

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yayasan pendidikan merupakan salah satu bentuk entitas nonlaba yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber perolehan dana operasional. Jika entitas bisnis mendapatkan pendapatan dari aktivitas jual beli yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented), maka entitas nonlaba seperti yayasan memperoleh sumber daya dari kontribusi sukarela, sumbangan, hibah, atau dana sosial lainnya (Maulana & Rahmat, 2021). Salah satu ciri khasnya adalah adanya transaksi dari donasi atau zakat yang tidak lazim ditemukan dalam praktik entitas komersial.

Peran penting akuntansi tidak hanya terbatas pada dunia bisnis, melainkan juga mencakup organisasi nirlaba. Akuntansi bertugas menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dimiliki (Darmawan, 2023). Namun dalam praktiknya, banyak yayasan pendidikan di Indonesia yang masih menomorduakan aspek pengelolaan keuangan dan lebih memfokuskan pada kualitas program atau layanan. Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian terhadap pentingnya sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana halnya perusahaan yang memerlukan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan efisiensi operasionalnya, lembaga pendidikan juga

sangat membutuhkan sistem pelaporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Laporan keuangan pada entitas nonlaba khususnya lembaga pendidikan berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dana yang dikelola.

Selain itu, kondisi pendidikan nasional menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data terakhir, sekitar 52% lembaga pendidikan dikelola oleh pemerintah (sekolah negeri), sedangkan sisanya sekitar 48% adalah sekolah swasta yang mayoritas dikelola oleh yayasan (Fatmawati & Nugraha, 2024). Fakta ini menunjukkan peran penting yayasan dalam mendukung sistem pendidikan nasional. Seiring dengan arus modernisasi dan tuntutan akan tata kelola yang akuntabel, yayasan pendidikan dituntut untuk dapat beradaptasi terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan sistem pelaporan keuangan digital yang transparan dan efisien (Ariesta et al., 2025).

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pelaporan keuangan yang optimal di lingkungan yayasan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala yang kerap ditemui antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Masalah-masalah tersebut berdampak pada kualitas penyajian laporan keuangan yang menjadi salah satu

indikator penting dalam menilai kinerja dan akuntabilitas sebuah lembaga nirlaba.

Sebagai entitas nonlaba, yayasan pendidikan tidak berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan lebih fokus pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan. Meskipun demikian, pengelolaan keuangan yang baik tetap menjadi komponen penting untuk menjamin keberlangsungan operasional dan kepercayaan masyarakat. Laporan keuangan yang disusun secara akurat dan akuntabel akan mencerminkan integritas lembaga serta menjadi alat untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan dana yang diterima dari donatur, masyarakat, maupun pemerintah (Kusmaeni & Syahrenny, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan standar baku yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba.

Salah satu standar tersebut adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). ISAK 35 diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2020 sebagai pedoman khusus penyajian laporan keuangan bagi organisasi nirlaba seperti yayasan pendidikan. Standar ini mengatur aspek penyajian, pengakuan, dan pengungkapan laporan keuangan yang meliputi: (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Penghasilan Komprehensif, (3) Laporan Perubahan Aset Neto, (4) Laporan Arus Kas, serta (5) Catatan atas Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Dengan berlakunya ISAK 35, yayasan pendidikan diharapkan tetap menyusun laporan keuangan mereka sesuai dengan format yang telah diatur yaitu mencakup lima laporan utama seperti yang disebutkan di atas. Namun demikian, tantangan implementasi ISAK 35 masih cukup besar. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sosialisasi yang luas terhadap pedoman ini. Selama ini, penyebaran informasi terkait standar ini lebih banyak dilakukan melalui forum akademik atau webinar yang terbatas pada kalangan tertentu seperti mahasiswa dan praktisi akuntansi. Hal ini menyebabkan banyak organisasi nonlaba belum mengetahui atau belum memahami pentingnya penerapan ISAK 35 dalam tata kelola keuangan mereka (Hartoko, 2023).

Dalam perspektif Islam, prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan sejatinya telah diajarkan secara mendalam dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 282 secara eksplisit memerintahkan pencatatan transaksi utang piutang secara adil dan akurat. Ayat ini juga menetapkan kewajiban adanya pencatatan oleh pihak yang kompeten dan menghadirkan saksi sebagai bentuk pertanggungjawaban:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

فَتَذَكِّرْ أَحَدَهُمَا الْآخَرَىٰ ۖ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ (البقرة/2: 282)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu

pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/2:282)

Ayat tersebut menjadi dasar spiritual sekaligus landasan etika bagi praktik akuntansi dalam Islam. Pencatatan transaksi bukan sekadar proses administratif, melainkan juga merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan profesional. Dalam konteks lembaga pendidikan, prinsip ini memiliki nilai penting yang melekat erat dengan akuntabilitas dan integritas lembaga di mata publik dan tuhan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan bukan hanya memenuhi kepatuhan terhadap peraturan negara, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai ideal tersebut dengan realitas implementasi standar akuntansi di lapangan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan pedoman pelaporan keuangan berbasis ISAK khususnya pada sektor pendidikan berbasis yayasan belum optimal. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rifana et al. (2023) pada MTs Al Washliyah Pajak Rambai Medan menemukan bahwa hanya sekitar 40% unsur laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 berdasarkan hasil penilaian menggunakan metode checklist. Sisanya sebesar 60% masih

belum mencerminkan ketentuan yang berlaku, menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan standar. Hal serupa ditemukan dalam studi oleh Diningsih et al. (2023) terhadap Yayasan RA Amal Shaleh yang menyatakan bahwa laporan keuangan yayasan tersebut masih sangat sederhana hanya berbentuk catatan penerimaan dan pengeluaran kas dari dana operasional rutin seperti BOP dan SPP tanpa menyusun laporan menyeluruh sesuai dengan format ISAK.

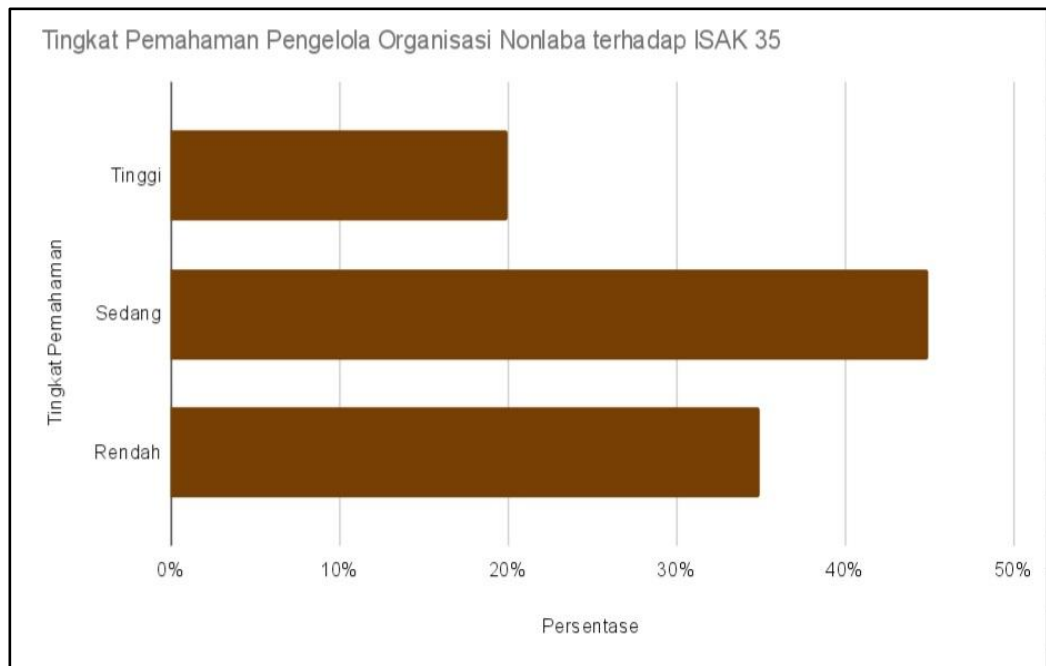
Kondisi serupa juga tampak pada salah satu studi kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni SMK PGRI 3 Jakarta. Sekolah ini merupakan unit pendidikan menengah kejuruan yang berada di bawah naungan Yayasan Perwakilan YPLP PGRI Provinsi DKI Jakarta. Secara hukum dan fungsi kelembagaan, SMK PGRI 3 Jakarta dikategorikan sebagai entitas nonlaba sehingga penyusunan laporan keuangannya wajib mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu ISAK 35. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa sekolah ini masih menjalankan sistem pencatatan keuangan secara manual dan sederhana tanpa penyusunan laporan keuangan secara lengkap sebagaimana diamanatkan dalam ISAK 35.

Berdasarkan wawancara awal dengan pihak bendahara sekolah, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat dalam implementasi standar pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 secara menyeluruh di SMK PGRI 3 Jakarta. Salah satu faktor krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi khususnya yang memahami karakteristik dan prinsip akuntansi untuk entitas nonlaba.

Kebanyakan staf administrasi keuangan yang ada hanya memiliki pengalaman dalam pencatatan sederhana berbasis kas, tanpa pelatihan formal dalam menyusun laporan keuangan yang terstruktur dan sesuai standar.

Selain itu, belum tersedianya sistem pencatatan keuangan yang terkomputerisasi atau terstandar membuat pencatatan bersifat manual dan rawan kesalahan. Hambatan lainnya adalah minimnya akses terhadap pelatihan atau sosialisasi terkait implementasi ISAK 35, baik dari pihak internal yayasan maupun dari lembaga eksternal seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau Dinas Pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural dalam organisasi. Untuk memberikan gambaran lebih luas tentang tingkat pemahaman pengelola organisasi nonlaba terhadap ISAK 35, berikut disajikan hasil survei awal yang dilakukan terhadap beberapa yayasan pendidikan di wilayah Jakarta dan sekitarnya:

Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Pemahaman Pengelola Organisasi Nonprofit terhadap ISAK 35



Sumber: Data Survei Awal (2025)

Temuan awal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara ketentuan akuntansi yang telah ditetapkan melalui ISAK 35 dengan praktik di lapangan, khususnya di lembaga pendidikan berbasis yayasan. Padahal, penyajian laporan keuangan yang sesuai standar tidak hanya penting untuk akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menjadi cerminan dari amanah pengelolaan dana publik secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan yang lebih mendalam mengenai bagaimana laporan keuangan disusun, apa saja tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana nilai-nilai Islam dapat turut memperkuat prinsip etika dalam pelaporan keuangan di organisasi nonlaba khususnya pada lembaga pendidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengambil judul “Kontruksi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus pada SMK PGRI 3 Jakarta)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah SMK PGRI 3 Jakarta?
2. Bagaimana kontruksi ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada SMK PGRI 3 Jakarta?
3. Bagaimana menurut sudut pandangan Islam mengenai kontruksi ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada SMK PGRI 3 Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi pencatatan dan pelaporan keuangan SMK PGRI 3 Jakarta.
2. Untuk mekontruksi ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada SMK PGRI 3 Jakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana menurut pandangan Islam mengenai penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada SMK PGRI 3 Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan menganalisis penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada SMK PGRI 3 Jakarta.

B. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu akuntansi dalam kaitannya pada penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada SMK PGRI 3 Jakarta.

C. Bagi Instansi

Sebagai masukan bagi instansi terkait untuk mempertimbangkan beberapa variabel atau faktor penting tentang penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada SMK PGRI 3 Jakarta.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada SMK PGRI 3 Jakarta. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam kebutuhan penelitian selanjutnya.